



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu

Christina Loe Mau¹, Yolinda Yanti Sonbay², Rere Paulina Bibiana³, M.E. Perseveranda⁴, Henny A. Manafe⁵, Stanis Man⁶

¹ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, christinaloemanu@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, yolinda81@gmail.com

³ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, paulinabibiana18@gmail.com

⁴ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, perseverandaerse@gmail.com

⁵ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com

⁶ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, stanisman08@gmail.com

Corresponding Author: christinaloemanu@gmail.com

Abstract: *This study is intended to be able to find out the use of information technology, regional financial supervision, and human resource capabilities in influencing the quality of the Belu Regency Government's financial reports. This study use primary data. Test the data for the preparation of descriptive analysis, test the validity or reliability, and test the classical assumptions while testing the hypothesis of implementing multiple regression analysis supported by SPSS version 16. The results of this study reveal that the use of information technology partially does not significantly affect the quality of financial reports. This is due to the lack of integration of the applications used, and the lack of computer facilities and infrastructure in each SKPD. The variable competence of human resources and regional financial supervision has a significant effect on financial reports. Tests carried out simultaneously with the Utilization of financial information technology, human resource competence, and regional supervision significantly affect the quality of financial reports.*

Keyword: *Utilization of Information Technology, Competence of Human Resources, Financial Monitoring, Quality of Financial Reports.*

Abstrak: Kajian ini bermaksud agar bisa mengetahui penggunaan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kemampuan sumber daya manusia dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. Kajian ini mempergunakan data primer. Uji data terlaksana mempergunakan analisis deskriptif, uji validitas ataupun reliabilitas, serta uji asumsi klasik sedangkan uji hipotesis terlaksana mempergunakan analisis regresi berganda dan didukung oleh SPSS versi 16. Hasil kajian ini memperlihatkan

bila penggunaan teknologi informasi secara parsial tidak memengaruhi secara signifikan bagi kualitas laporan keuangan. Perihal ini dikarenakan masih belum terintegrasi aplikasi yang digunakan, dan masih kurangnya sarana dan prasarana komputer pada masing-masing SKPD. Variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah memengaruhi secara signifikan bagi laporan keuangan. Pengujian yang terlaksana secara simultan Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia maupun pengawasan keuangan daerah memengaruhi signifikan bagi kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan tuntutan yang muncul dalam perkembangan pemerintahan Indonesia sejauh ini. Akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan keterbukaan dan penyediaan informasi yang sesuai maupun terpercaya untuk pihak terkait. Perihal itu diakibatkan oleh peningkatan tuntutan masyarakat kepada pemerintahan yang baik, selanjutnya mengarahkan pemerintah pusat/daerah guna mengaktualisasikan akuntabilitas publik.

Penciptaan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik bisa terlaksana dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara ekstensif. Pemerintah daerah setidaknya bisa melaporkan keuangannya berdasar pada prinsip tepat waktu maupun dirancang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan sebagai laporan tersistem perihal kedudukan finansial maupun transaksi atas pelaporan entitas tertentu. LKPD meliputi tujuh unsur, yakni laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang bermutu ditentukan berdasar pada kriteria yang sesuai, terpercaya, bisa membandingkannya, dan mudah dalam memahami isi laporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Jika informasi yang ada di laporan keuangan berdasar pada ketentuan yang diinginkan, maka pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban selama mengelola keuangan daerahnya. Mutu laporan keuangan daerah ditentukan tiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor pemerintah. Persentase kewajaran berbentuk opini dengan menimbang karakteristik laporan keuangan berdasar pada standar akuntansi pemerintahan (SAP), yakni kecukupan dalam mengungkapkan, patuh dengan undang-undang, dan efektivitas dalam mengendalikan bagian internal. BPK akan memberi empat opini audit, seperti wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) maupun tidak memberikan pendapat (TMP).

Kian bermutunya tata kelola keuangan daerah bisa diperlihatkan melalui kian banyak opini WTP atas penilaian LKPD yang diterbitkan oleh BPK. Opini WTP ialah unsur terpenting yang bisa dijadikan indikator keterbukaan keuangan daerah yang terlaksana secara wajar, terbebas dari kesalahan dalam menyajikan, dan sesuai aturan keuangan. Pada kajian ini, faktor pertama yang memengaruhi mutu laporan keuangan ialah pemanfaatan teknologi informasi berupa sistem informasi akuntansi keuangan daerah: laporan keuangan diperoleh berdasar kepada input, proses maupun output yang baik. Tiga aspek itu perlu terintegrasi dan terkait satu sama lain sebagai fondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan dan Selamat, 2011). Indikator pemanfaatan teknologi informasi meliputi prosedur secara elektronik, mengolah maupun menyimpan data keuangan, dan mengolah informasi melalui jaringan internet.

Rahmawati., et al (2018) menemukan bila implementasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi secara parsial memengaruhi positif bagi mutu

laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rosmalita dan Nadirsyah (2020) mendapati bila utilitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah memengaruhi mutu laporan keuangan Pemerintah Aceh. Aswandi (2018) mendapati bila utilitas teknologi informasi akuntansi memengaruhi negatif bagi mutu laporan keuangan organisasi nirlaba. Modo., et al (2016) mendapati bila penggunaan teknologi Informasi memengaruhi negatif dan tidak cukup penting bagi mutu informasi laporan keuangan. Sesuai dari beberapa kajian itu, memperlihatkan bila terdapat inkonsistensi pemanfaatan teknologi informasi dalam memengaruhi mutu laporan keuangan.

Faktor kedua yang berpartisipasi dalam memengaruhi mutu laporan keuangan, yaitu pengawasan. Pengawasan keuangan daerah menjadi aktivitas terencana yang bermaksud guna memberi jaminan supaya tata kelola keuangan terlaksana sesuai undang-undang, serta dikaitkan ke seluruh hak maupun kewajiban daerah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan (Subekan dan Hartoyo, 2012:38).

Sebenarnya pengawasan dimaksudkan guna menghindari dari potensi penyimpangan terhadap tujuan yang hendak diperoleh. Melalui pengawasan ini, paling tidak bisa membantu melaksanakan kebijakan yang sudah terencana demi memperoleh tujuan seefektif maupun seefisien mungkin. Dengan penciptaan pengawasan, maka bisa melahirkan kegiatan yang terkait dengan penetapan maupun pengevaluasian terhadap seberapa jauh melaksanakan pekerjaan, seberapa jauh kebijakan pimpinan terlaksana, serta seberapa jauh penyelewengan terjadi selama melaksanakan pekerjaan itu. Indikator pengawasan keuangan meliputi pemerintahan yang terbebas dari KKN, pengevaluasian terhadap aktivitas, mencatat transaksi sesuai bukti dan tepat waktu.

Pujiswara., et al (2014) mendapati bila pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif bagi nilai informasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kusuma., et al (2016) mendapati bila pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif dan bermakna bagi informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Jembrana. Rahmawati., et al (2018) mendapati jika sistem kontrol intern memengaruhi positif bagi mutu laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Aswandi (2018) mendapati bila pengawasan tanpa memengaruhi mutu laporan keuangan organisasi nirlaba di Kota Padang. Sesuai hasil kajian itu, memperjelas bila ada ketidakkonsistenan pada pengawasan dalam memengaruhi mutu laporan keuangan.

Faktor ketiga yang memengaruhi mutu laporan keuangan berasal dari kemampuan/kompetensi sumber daya manusia (SDM). SDM harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik sebagai penunjang kinerjanya untuk mewujudkan kualitas LKPD yang baik. Gasperz (2019) mendapati jika kompetensi ialah sejumlah atribut dalam diri individu hasil perpaduan dari pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dapat mengoptimalkan kinerja individu itu sendiri.

Kompetensi SDM berkorelasi dengan kualitas LKPD terkait tata kelola keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mempunyai SDM yang berkompeten, berpengalaman, dan berlatar belakang akuntansi. Adanya pengalaman, pengetahuan dan hasil kerja yang dihasilkan oleh SDM tersebut bakal memengaruhi kualitas LKPD. Makin berkompetensi SDM, maka makin berkualitas LKPD yang dihasilkan pemerintah (Utama., et al, 2017). Indikator kompetensi SDM meliputi keterampilan seseorang, peranan dalam memperoleh tujuan, pemahaman terhadap tata cara/proses akuntansi, dan pelatihan teratur.

Yaqin dan Jatmiko (2018) mendapati bila keterlibatan kompetensi SDM memengaruhi positif bagi mutu laporan keuangan pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. Hafidz (2020) mendapati bila kompetensi SDM memengaruhi cukup penting bagi laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Aswandi (2018) mendapati jika kompetensi SDM memengaruhi negatif bagi mutu laporan keuangan organisasi nirlaba. Aprisyah dan Anik (2021) memperjelas kompetensi SDM tanpa

memengaruhi mutu LKPD. Sesuai hasil kajian tersebut, memperjelas bila terdapat inkonsistensi kompetensi SDM dalam memengaruhi mutu laporan keuangan.

Kab. Belu ialah satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan opini LKPD di Pemerintah Kabupaten Belu sampai tahun anggaran 2021 tertera di uraian berikut.

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Belu

LKPD	2016	2017	2018	2019	2020
OPINI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI, 2016-2020

Kali pertama Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh status opini WTP pada tahun 2019 berkat pemeriksaan BPK pada LKPD tahun anggaran 2018. Keberhasilan dalam meraih opini WTP tentu tanpa mengabaikan catatan permasalahan dari BPK. Catatan itu termuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kab. Belu Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Belu tetap berkewajiban menuntaskan seluruh masalah yang ada di LKPD demi menciptakan LKPD yang lebih bermutu. Catatan dari BPK itu masih belum memadai tata kelola aset, baik aset tetap ataupun aset lainnya, termasuk ketidakpatuhan dalam tata kelola keuangan negara.

Kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Belu selama memperjuangkan opini WTB, yaitu mengenai kesalahan pencatatan. Permasalahan di dalam LKPD bisa diakibatkan oleh belum optimalnya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berdasar pengamatan yang dilakukan di lapangan Pemerintah Kab. Belu sudah mempergunakan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), baik SIMDA keuangan untuk penganggaran hingga pelaporan, maupun SIMDA BMD untuk pencatatan barang milik daerah sejak tahun anggaran 2016. Namun, masih ada masalah yang kurang mendukung selama menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik karena dua sistem itu belum terintegrasi dengan baik sehingga dalam penyajian data masih terdapat kesalahan pencatatan.

Dalam penyajian laporan keuangan tentu saja membutuhkan SDM yang kompeten di bidang akuntansi maupun teknologi informasi, sedangkan Pemerintah Kab. Belu masih belum memenuhi kebutuhan tersebut sehingga masih sering terjadi *human error*. Sesuai data yang diperoleh di lapangan, diperoleh data pegawai yang menangani laporan keuangan pada unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Belu tertera di uraian berikut.

Tabel 2. Data Pegawai pengelola LKPD pada unit organisasi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SMA	13 Orang
2.	Diploma	58 Orang
3.	Sarjana (S1)	100 Orang

Sumber: BPKAD, 2021

Selain permasalahan terkait bidang teknologi informasi dan SDM, terdapat permasalahan dalam mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan anggaran maupun belanja daerah. Berdasar kajian di lapangan, didapati bila jumlah auditor di inspektorat selaku lembaga pengawasan internal pemerintah masih belum cukup. Jumlah auditor hingga tahun 2020 berjumlah 20 orang dan melakukan pengawasan terhadap 34 dinas, 12 kelurahan dan 12 kecamatan. Karena jumlah auditor yang belum memadai, pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal.

Berdasar hal-hal di atas, penulis tertarik melaksanakan kajian berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

Berdasar pemaparan tersebut, peneliti bisa merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran umum perihal pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah maupun kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi secara bermakna bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah memengaruhi secara bermakna bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia memengaruhi secara bermakna bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi SDM secara bersamaan memengaruhi secara bermakna bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?

METODE

Sugiyono (2017:39) menyebut populasi menggeneralisasikan objek/subjek yang berkualitas maupun berkriteria tertentu atas penentuan peneliti agar bisa dikaji, selanjutnya menarik simpulannya. Populasi dalam kajian ini ialah semua satuan perangkat kerja daerah atau SKPD pada pemerintah Kab. Belu.

Sesuai pemaparan di atas, rumusan hipotesis yang menjadi jawaban sementara pada kajian ini ialah:

H₁ : Variabel pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

H₂ : Variabel pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

H₃ : Variabel kompetensi SDM memengaruhi positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

H₄ : Variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah maupun kompetensi SDM secara simultan berpengaruh positif bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis deskripsi terhadap pemanfaatan teknologi informasi terlaksana sesuai jawaban informan perihal pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan ke pejabat pelaksana kegiatan, yaitu kepala subbagian keuangan bersama staf dengan dimensi proses kerja secara elektronik, olah data maupun menyimpan data keuangan, dan mengolah informasi melalui jaringan internet. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan, diperoleh gambaran perihal persentase jawaban tersebut.

Tabel 3. Tanggapan Responden atas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
X1 1.1	81	Sangat Baik	Proses kerja secara elektornik	80,33	Sangat baik	76,84	Baik
X1 1.2	82	Sangat Baik					
X1 1.3	78	Baik					
X1 2.1	79	Baik	Pengolahan dan penyimpanan data keuangan	74,22	Baik		
X1 2.2	70,33	Baik					
X1 2.3	73,33	Baik					
X1 3.1	67,33	Baik	Pengolahan informasi dengan jaringan internet	75,99	baik		
X1 3.2	81,33	Sangat Baik					
X1 3.3	79,33	Baik					

Uraian tersebut memperjelas tanggapan informan perihal pemanfaatan teknologi informasi (X1) diperoleh skor **76,84%**, berkategori **“BAIK”**. Beracuan ke jawaban dari informan, memperjelas jika pemerintah kabupaten Belu telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Kab. Belu sudah memanfaatkan SIMDA, walaupun belum sepenuhnya berbasis aktual.

Analisis deskripsi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah terlaksana sesuai jawaban informan perihal pengawasan keuangan ke tiap SKPD. Beracuan ke jawaban atas pertanyaan dan indikator, serta secara total dan skor total maupun skor idealnya.

Tabel 4. Tanggapan Responden atas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
X2 1.1	74,67	Baik	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	77,44	Baik	78,72	Baik
X2 1.2	77,67	Baik					
X2 1.3	80	Baik					
X2 2.1	76,33	Baik	Evaluasi kegiatan	78,33	Baik		
X2 2.2	79	Baik					
X2 2.3	79,67	Baik					
X2 3.1	81,67	Sangat Baik	Pencatatan transaksi berdasarkan bukti	81,67	Sangat Baik		
X2 4.1	79,33	Baik	Pencatatan transaksi tepat waktu	77,44	Baik		
X2 4.2	76,33	Baik					

Sumber: hasil olah data primer. 2022

Pemaparan tersebut menjabarkan respons informan perihal pengawasan keuangan daerah. Berdasar hasil pengolahan yang tersaji, skor total untuk variabel pengawasan keuangan daerah adalah 78,72 % dan berada pada tingkat kategori **“BAIK”**. Berdasarkan pernyataan responden dapat ditarik simpulan bila pengawasan keuangan daerah dilingkup pemerintah Kab. Belu cukup memadai. Selain itu, lembaga audit internal pemerintah sudah melakukan audit secara terus menerus sehingga laporan keuangan yang tersaji pun jauh lebih baik.

Analisis deskripsi terhadap kompetensi SDM dilakukan sesuai hasil jawaban informan perihal kompetensi SDM ke tiap SKPD. Berdasar jawaban atas tiap pertanyaan diperoleh gambaran perihal persentase jawaban atas pertanyaan dan indikator, serta secara skor total dan skor idealnya.:

Tabel 5. Tanggapan Responden atas Variabel Kompetensi SDM

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
X3 1.1	80	Baik	Kemampuan individu	82,44	Sangat Baik	74,10	Baik
X3 1.2	79,33	Baik					
X3 1.3	88	Sangat Baik					
X3 2.1	80	Baik	Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan	77	Baik		
X3 2.2	74	Baik					
X3 2.3	72,33	Baik	Memahami prosedur dan proses akuntansi	73,33	Baik		
X3 3.1	74,33	Baik					
X3 4.1	65,33	Baik	Pelatihan yang teratur	63,66	Baik		
X3 4.2	62	Baik					

Tabel tersebut memperjelas tanggapan responden mengenai kompetensi sumber daya manusia. Sesuai hasil pengolahan yang disajikan pada table diatas, skor total untuk kompetensi sumber daya manusia 74,10 % berkategori “**BAIK**”. Berdasar pernyataan responden, memperjelas bila kompetensi SDM pengelola keuangan sudah memadai, meski perlu ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan formal terkait tata kelola keuangan daerah.

Analisis deskripsi kepada kualitas/mutu laporan keuangan pemerintah daerah terlaksana berdasar hasil jawaban informan menggunakan tolok ukur sesuai, terpercaya, bisa membandingkannya dan mudah memahaminya. Berdasarkan jawaban atas masing-masing pertanyaan diperoleh gambaran tentang persentase jawaban atas tiap pertanyaan, indikator dan dimensi maupun secara total, serta skor total dan skor idealnya.

Tabel 6. Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
Y 1.1	85	Sangat Baik	Relevan	80,33	Baik	80,49	Baik
Y 1.2	77,33	Baik					
Y 1.3	78,67	Baik					
Y 2.1	79,33	Baik	Andal	77,66	Baik		
Y 2.2	73,33	Baik					
X 2.3	80,33	Baik					
X 3.1	81,67	Sangat Baik	Dapat Dibandingkan	81,67	Sangat Baik		
X 4.1	82,33	Sangat Baik	Dapat dipahami	82,33	Sangat Baik		

Uraian tersebut memperjelas respons informan terkait kualitas laporan keuangan pemda. Sesuai hasil pengolahan, skor total bagi kualitas laporan keuangan pemda ialah 80,49%. Melalui hitungan tersebut, memperlihatkan nilai yang berkategori “**BAIK**”. Berdasar pernyataan responden, menyimpulkan jika mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu telah memadai dalam prosesnya. Tetapi, masih terdapat bermacam faktor yang perlu mendapat perbaikan agar tetap memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Pembahasan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu

Berdasar uji H₁, didapatkan bila penggunaan teknologi informasi tidak memengaruhi secara bermakna bagi mutu laporan keuangan. Hal ini membuktikan hipotesis bila penggunaan teknologi informasi tanpa memengaruhi bermakna bagi mutu laporan keuangan di Pemerintah Kab. Belu.

Teknologi informasi bukan sekadar berupa teknologi komputer (perangkat keras/lunak) guna memproses maupun menyimpan informasi, tetapi berperan untuk teknologi komunikasi demi menyebarkan informasi kendati masih memiliki keterbatasan. Belum seluruh SKPD mempunyai tenaga operator komputer maupun perangkat pendukung yang mumpuni. Sesuai rekapan pertanyaan terbuka di angket, aspek yang menghambat pemakaian teknologi informasi secara umum ialah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas mumpuni untuk mengelola teknologi informasi keuangan daerah.

Kendala lain, yaitu minimnya dukungan kebijakan atau kurang tegas pimpinan dalam mengembangkan teknologi informasi untuk mengelola keuangan daerah. Hasil kajian memberi indikasi bila upaya pemerintah belum optimal dalam pengembangan teknologi informasi tata kelola keuangan daerah. Kondisi itu tampak dari penggunaan dua aplikasi keuangan sekaligus yaitu SIPD dan SIMDA FIMS. Para administrator pada tiap SKPD diminta untuk menginput pada dua aplikasi tersebut. Perihal ini tentunya

memerlukan waktu lebih lama, serta tidak efisien. Pemerintah daerah sendiri belum membuat kebijakan tentang sistem maupun cara kerja aplikasi akuntansi keuangan, kebijakan mengenai standar spesifikasi perangkat keras teknologi informasi pemerintah daerah ataupun keamanan data keuangan daerah, termasuk jenis informasi keuangan daerah yang harus termuat ke website.

Mengembangkan teknologi informasi tata kelola keuangan daerah harus ditunjang oleh beberapa hal, seperti SDM, perangkat lunak/keras yang layak, dan kebijakan atau aturan yang menampung satuan kerja yang mempertanggungjawabkan upaya pengelolaan data keuangan daerah secara digital. Sepatutnya pemerintah daerah membuat aplikasi komputer yang diintegrasikan ke tata kelola keuangan daerah. Ketidaksignifikan pun diakibatkan oleh teknologi informasi yang belum dipergunakan secara maksimal, belum memaksimalkan kesadaran guna memperbarui teknologi informasi berdasar SAP dan penerapan teknologi informasi yang memerlukan anggaran dana besar, maka penerapannya pun sia-sia dan tidak menunjang pelaporan keuangan yang terpercaya/berkualitas.

Seperti kajian Modo., et al (2016), menyebut bila pemanfaatan teknologi informasi tanpa memengaruhi mutu informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Talaud. Berbeda dengan kajian Aswandi (2018), yaitu penggunaan teknologi informasi akuntansi memengaruhi mutu laporan keuangan organisasi nonprofit

2. Pengawasan Laporan Keuangan Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu

Berdasar pengujian H₂ didapatkan bila pengawasan laporan keuangan memengaruhi positif bagi mutu laporan keuangan. Hal ini memberi bukti bila hipotesis penelitian, yaitu pengawasan laporan keuangan memengaruhi secara bermakna bagi mutu laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu. Dapat memberi simpulan jika pengawasan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu sangat memengaruhi mutu laporan keuangan di Pemerintah Kab. Belu.

Pengawasan ialah usaha guna mengidentifikasi penyimpangan atau kendala selama mengelola keuangan daerah. Jika nantinya dijumpai ada penyimpangan/kendala, paling tidak bisa lekas mengambil tindakan untuk mengoreksi. Dengan begitu, informasi keuangan bisa lekas dipergunakan oleh pengguna, serta tata kelola keuangan pemerintah daerah bisa terlaksana secara optimal. Tujuan utama pengawasan tidak sekadar menemukan kesalahan, tetapi terarah ke penyelenggaraan kegiatan supaya rencana yang ditentukan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan terhadap keuangan daerah setidaknya bisa memberi jaminan supaya penyelenggaraan aktivitas pemerintahan terlaksana berdasar rencana anggaran maupun undang-undang. Selain itu, pengawasan efektif bisa meningkatkan mutu informasi laporan keuangan, kendati belum maksimal

Pada kajian ini memperjelas bila secara individual pengawasan keuangan daerah memengaruhi yang signifikan bagi mutu informasi pelaporan keuangan (Y). Perihal ini memperjelas bila pengawasan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Belu sudah memberi jaminan bila seluruh pencatatan akuntansi maupun keuangan pemerintah sudah memberi keyakinan yang layak dan berdasar pada tata cara/aturan, maka tujuan dalam pembuatan laporan yang bermutu sudah dicapai.

Seperti kajian Modo., et al (2016), memperjelas jika pengawasan internal maupun mutu informasi laporan keuangan memengaruhi bermakna bagi Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Talaud. Pratiwi., et al, (2015), pengawasan keuangan daerah, SDM, penggunaan teknologi informasi maupun pengendalian intern akuntansi memengaruhi nilai informasi dalam melaporkan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Ponamon (2014), yaitu pengawasan internal memengaruhi mutu informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Manado. Andiani (2012) memperjelas, yaitu penerapan pengawasan memengaruhi tata kelola keuangan daerah.

3. Kompetensi SDM Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kab. Belu

Berdasar uji H_3 didapati bila kemampuan SDM memengaruhi secara signifikan bagi mutu laporan keuangan. Perihal ini membuktikan bila bahwa kemampuan SDM memengaruhi secara signifikan bagi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kab. Belu. SDM maupun mutu laporan keuangan berhubungan positif: kian baik mutu SDM, maka kian membaik laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi/kemampuan SDM memengaruhi mutu laporan keuangan akibat pegawai yang mengelola akuntansi mempunyai kemampuan dan pemahaman mengenai proses penyusunan LKPD, selain itu SDM begitu optimal dalam menggunakan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah daerah. Selain itu, tingkat pendidikan yang baik dan kerap terlihat dalam pelatihan mengelola keuangan daerah, tentu kian membaik laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan pemerintah pun kian efektif bila tersaji dengan mutu SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Seperti kajian Modo., et al (2016), diperoleh bila kapasitas SDM memengaruhi mutu informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kepulauan Talaud. Pratiwi., et al, (2015) melalui kajiannya memperjelas bila SDM memengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Tabanan. Lain dengan kajian Animah dan Widia (2020), yaitu kompetensi SDM tanpa memengaruhi kualitas LKPD. Kajian Aprisyah dan Yuliati (2021) memberi hasil bila kompetensi SDM tanpa memengaruhi mutu LKPD di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Kompetensi SDM secara Bersama-Sama Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu

Berdasar pengujian yang terlaksana secara simultan (uji f) antara penggunaan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi SDM kepada mutu laporan keuangan, didapati bila variabel tersebut secara simultan memengaruhi cukup penting bagi mutu laporan keuangan daerah di Pemerintah Kab. Belu. Hal ini mengindikasikan bila variabel tersebut berhubungan positif. Makin baik teknologi informasi yang digunakan, kian sering pengawasan dilakukan, dan didukung oleh SDM yang kompeten, tentu mutu laporan keuangan pemerintah daerah pun kian membaik.

KESIMPULAN

Beracuan ke hasil kajian, maka simpulan yang peneliti dapatkan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Belu terkait penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya telah memanfaatkan sistem informasi keuangan. Namun, sistem yang mereka gunakan belum terintegrasi. Kendala yang dihadapi sekarang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan penggunaan SIPD: aplikasi itu belum sepenuhnya bisa dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Penggunaan teknologi informasi tanpa memengaruhi secara bermakna bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
3. Kompetensi SDM memengaruhi cukup penting bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
4. Pengawasan keuangan memengaruhi cukup penting bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi, Pengawasan keuangan, kompetensi SDM memengaruhi cukup penting dan secara simultan bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

REFERENSI

Animah, Bayu, S. A., Widia, Astuti. 2020. Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jaa*, 5(1), pp 99-109

- Andiani, Novi. 2012. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Di Kabupaten Boyolali). *Naskah Publikasi* Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Aprisyah, Pegi., Yuliati, Anik. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 5 No. 2, pp 1855-1969
- Aswandi, Wahyu. 2018. Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 6 No 1 (2018), pp 1-14
- Gasperz, J. J. 2019. Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75.
- Hafidz, Asri. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. *Maksi Universitas Tanjungpura* Vol 5, No 1 (2020)
- Husna, Tissa Nurul. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal JOM Fekom* Vol.4 No.1
- Kurniawan dan Selamat. 2011. *Penyerahan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010*. Warta BPK.
- Kusuma, Febry Perdana., Yasa, I. Nyoman Mahaendra., & Djayastra, I. ketut. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1(2), pp 4115–4150
- Modo, Sintike Mentari., Saerang, David Paul Elia., Poputra, Agus Tony. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* Volume 7 Nomor 2, pp 14-30
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pratiwi, Putu Ratih., Adiputra, Made Pradana., Atmadja, Ananta Wikrama T. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1* Volume 3 No. 1 Tahun 2015, pp 1-12
- Pujiswara, Ida Bagus., Herawati, Nyoman Trisna., & Sinarwati, Ni Kadek. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungklung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Rahmawati, Astika., Mustika, I Wayan., Eka, Lilik Handaya. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem

- Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, pp 8-17
- Rosmalita, Nova., Nadirsyah. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5, No. 2, (2020) E-ISSN 2581-1002, pp 239-248
- Safrida, 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi* Vol. 3. No. 2.
- Subekan, Achmat., Hartoyo, Nafsi. 2012. Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan. Malang: DIOMA
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5, No.2
- Yaqin, Addinul., Jatmiko, Bambang. 2018. Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 2 No. 1 Juli 2018, pp 1-10